

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Collaborative Governance dalam tata kelola retribusi parkir di Kota Kupang memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan parkir. Indikator utama seperti dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan saling memahami menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, pengelola parkir, masyarakat, dan pemilik usaha. Meskipun telah ada upaya komunikasi dan partisipasi, tantangan seperti kurangnya pengawasan, transparansi yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran beberapa stakeholder perlu ditangani secara serius. Penguatan komunikasi terbuka, peningkatan kepercayaan melalui transparansi, serta komitmen bersama dari semua pihak menjadi fondasi penting untuk mencapai tata kelola parkir yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi Collaborative Governance sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan dari semua elemen tersebut. Membangun kepercayaan dan memperkuat saling memahami harus dilakukan secara terus-menerus melalui dialog, transparansi data, dan penegakan aturan yang adil. Pemerintah perlu lebih aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat serta pengelola parkir agar kerjasama dapat berjalan harmonis. Dengan demikian, tata kelola parkir di Kota Kupang dapat menjadi contoh implementasi pengelolaan layanan publik yang berbasis kolaborasi dan partisipasi

aktif seluruh stakeholder demi meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus kesejahteraan masyarakat.

6.2 Saran

1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas dialog tatap muka antara pemerintah, pengelola parkir, dan masyarakat melalui forum resmi dan media digital.
2. Memperkuat sistem transparansi data dan laporan keuangan retribusi parkir agar seluruh stakeholder dapat memantau dan memastikan akuntabilitas.
3. Menegakkan aturan dan sanksi secara tegas terhadap pengelola dan petugas parkir yang tidak mematuhi ketentuan, termasuk pungutan liar.
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pengelola parkir mengenai pentingnya kolaborasi dan peran masing-masing pihak.
5. Mengembangkan inovasi teknologi dalam pengelolaan parkir, seperti sistem digital dan aplikasi, untuk mendukung proses pengawasan, pengumpulan retribusi, dan komunikasi yang lebih efektif